



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
KOMISI IV DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
KOMISI IV DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
6-10 MEI 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka melaksanakan tugas DPR RI terkait dengan permasalahan di Bidang Pangan dan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan dasar hukum di bawah ini:

1. Peraturan Dewan Perwakilan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepala Dinas, penyuluh pertanian, penggiling padi, dan gapoktan/poktan/petani terkait dengan permasalahan produksi pertanian, pasokan, dan harga komoditas pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mendengarkan penjelasan dan berdiskusi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepala Dinas terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan perikanan di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan; serta
3. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepala Dinas, dan Wakil Kelompok masyarakat binaan terkait dengan pengelolaan sampah yang bernilai tambah di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meliputi bidang Pangan dan Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M. dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. LOKASI DAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 6-10 Mei 2024. Adapun lokasi yang dipilih untuk Kunjungan Kerja Reses, antara lain:

1. PSDKP Makassar, Kompleks PPN, Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
2. Perum BULOG Kanwil Sulsel & Sulbar; serta
3. Agrofarm Store, kelompok binaan mitra binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Jl Toddopuli Raya Timur 171-170, Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar.

II. GAMBARAN UMUM

Peningkatan harga komoditas beras secara Nasional, terjadi sejak Tahun 2023. Disamping peningkatan harga beras di beberapa pasar tradisional, pasokan beras juga mengalami penurunan. Pemerintah menyebutkan bahwa penurunan pasokan beras dikarenakan adanya penurunan produksi akibat adanya fenomena El Nino sehingga kondisi tersebut menyebabkan persaingan dalam mendapatkan bahan baku yaitu gabah di tingkat petani. Penggiling padi juga sempat menyebutkan bahwa penggiling padi skala menengah ke bawah terpaksa bersaing untuk mendapatkan gabah karena jumlah gabah mengalami penurunan dan harga gabah juga mengalami peningkatan.

Perum Bulog sebagai operator Pemerintah, memiliki peran besar dalam menyerap gabah dan beras petani lokal. Namun dengan adanya permasalahan diatas, Perum Bulog tidak mampu menyerap gabah dan beras petani secara maksimal dikarenakan adanya persaingan usaha dan HPP yang ditetapkan Pemerintah dalam membeli gabah dan beras petani, lebih rendah dibandingkan dengan harga jual yang ada di pasaran.

Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional memutuskan melakukan impor beras dari beberapa Negara, guna menyelamatkan Cadangan Beras Pemerintah yang semakin lama mengalami penurunan dan menekan harga beras di tingkat konsumen melalui operasi pasar atau kegiatan lainnya. Adapun jumlah beras impor yang masuk ke Indonesia melalui penugasan Perum Bulog, diantaranya:

TAHUN	BULAN	TOTAL (KG)
2022	Dec	57.416.500
2023	Jan	240.954.750
2023	Feb	83.443.550
2023	Mar	111.041.050
2023	Apr	70.900.000
2023	May	254.788.150
2023	Jun	155.673.750
2023	Jul	249.362.800
2023	Aug	225.449.050
2023	Sep	139.839.000
2023	Oct	321.246.150
2023	Nov	425.245.900
2023	Dec	531.234.600
2024	Jan	325.882.500
2024	Feb	546.482.200
2024	Mar	98.334.000
TOTAL		3.837.293.950

BPS telah merelease inflasi pada bulan Februari 2024 mencapai 0,37% (MtM/bulanan) dan 2,75% (YoY/Tahunan), lonjakan inflasi dipicu oleh kenaikan harga beras dimana inflasi beras di bulan Februari mencapai 18,41% dan menjadi yang tertinggi sejak Desember 2023. Memasuki masa panen raya, BPS dalam hasil KSA (Kerangka Sampel Area) memaparkan bahwa potensi luas panen padi pada bulan Maret 2024 akan mencapai 1,247 juta Ha atau setara beras 3,83 juta ton. Sementara potensi luas panen padi pada bulan April diperkirakan mencapai 1,587 juta Ha atau setara dengan 4,9 juta ton beras dan total produksi beras pada bulan Maret-Mei 2024 diperkirakan mencapai 12,08 juta ton.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang menyumbang pangan Nasional. Pada awal Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan masuk kedalam tiga besar Indeks Ketahanan Pangan terbaik secara Nasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ketahanan pangan Indonesia. Berdasarkan data dan informasi di media, produksi gabah kering

giling di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 5,3 juta ton atau sekitar 3 juta ton beras, sementara kebutuhan konsumsi masyarakatnya hanya mencapai 1 juta ton beras. Dengan adanya surplus beras di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan Pemerintah dapat menyerap gabah/beras petani guna memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah.

Sektor Perikanan merupakan sektor kedua yang menjadi sorotan Komisi IV DPR RI dikarenakan adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa KKP telah menangkap dua kapal ikan Indonesia (KII) yang diduga melanggar daerah penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 731 Selat Makassar. Kegiatan penangkapan tersebut dilakukan guna menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan juga sebagai langkah preventif agar tidak terjadi konflik horizontal antara nelayan. Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan tersebut karena penangkapan ikan ilegal atau *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan dan masih marak terjadi di perbatasan maupun di berbagai wilayah perairan Indonesia.

Di sektor Lingkungan Hidup, Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi dari beberapa media yang menyebutkan bahwa tahun lalu Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan banyak sorotan karena banyaknya timbunan sampah sementara daya tampung TPA sudah tidak memadai dan mengakibatkan kebakaran. Provinsi Sulawesi Selatan juga mendapatkan sorotan karena pengelolaan sampah di TPA tidak berjalan dengan maksimal dan kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam pengelolaan sampah. Komisi IV DPR RI menyikapi adanya perubahan dari kebijakan Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah telah melakukan Pengelolaan sampah dengan baik. Terdapat 600 bank sampah di Kota Makassar berkontribusi dalam pengolahan sampah anorganik dan menjadi sumber pembangkit listrik tenaga sampah. Sementara pengolahan sampah organik, Pemerintah Daerah bermitra dengan Agrofarm Store di Makassar mengembangkan pupuk kompos dengan bantuan maggot sebagai pengurai limbah organik. Komisi IV DPR RI menyoroti pengelolaan sampah tersebut ditengah adanya isu semakin besarnya jumlah sampah Nasional, lemahnya manajemen pengelolaan sampah Nasional,

kebutuhan akan pupuk organik yang sangat meningkat, dan Upaya Pemerintah untuk mengelola sampah dengan menggunakan pendekatan “zero waste”.

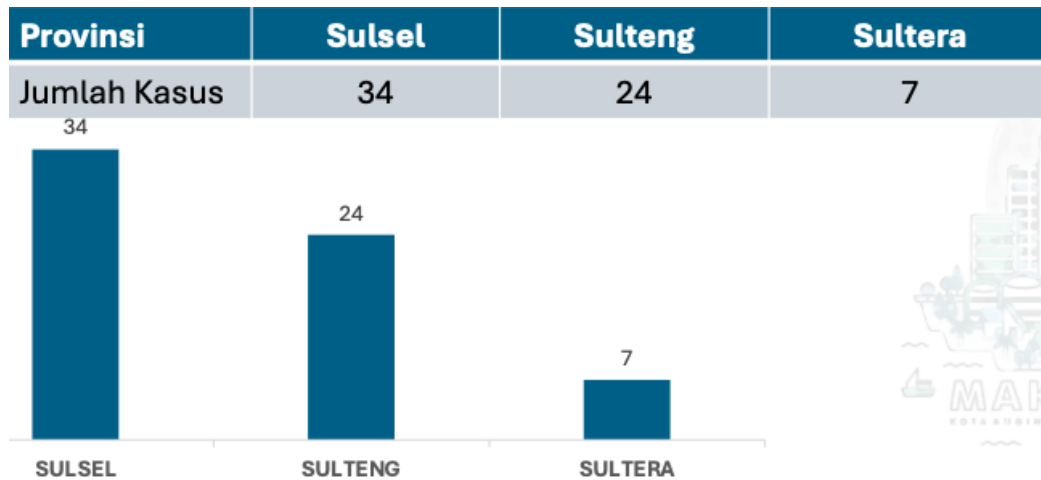
III. HASIL KUNJUNGAN

A. PENINJAUAN DAN DISKUSI DI PSDKP MAKASSAR

Satwas SDKP Makassar merupakan salah satu satwas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Bitung dengan wilayah kerja meliputi kota Makassar, Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Panggajene Kepulauan, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Wajo (atau secara wilayah perairan adalah WPPNRI 713). Berdasarkan hasil pemantauan, Satwas SDKP Makassar telah memetakan pengawasan kelautan yang umumnya terjadi pelanggaran Sumber daya Kelautan. Di sekitar Teluk Tolo umumnya terjadi pelanggaran kapal kandas, sekitar teluk tomini terjadi pelanggaran *destructive fishing*, dan di sekitar Teluk Bone atau di sebaran daerah tambang sering berpotensi kerawanan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dan pencemaran perairan.

Destructive Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara penangkapan ikan yang dapat merusak sumberdaya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan kimia, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan tersebut tidak hanya melukai target, namun juga dapat membunuh berbagai jenis ikan lainnya dan hewan-hewan kecil lain sehingga dapat merusak regenerasi dan rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut. Berdasarkan data yang di peroleh, Tahun 2016-2024, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah kasus *destructive fishing* tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Analisis dari Satwas SDKP Makassar menyimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi karena kasus *destructive fishing* di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan

Sulawesi Tenggara dikaitkan dengan alur distribusi pupuk bahan pembuat bom ikan, pemodal, dan lokasi penjualan ikan hasil *destructive fishing*.



Kegiatan lainnya yang telah dilakukan oleh Satwas SDKP sejak Tahun 2020 hingga saat ini adalah:

1. Tahun 2020 di Kep. Sangkarang dan Galesong terdapat konflik antara nelayan dengan pelaku usaha penambangan pada kegiatan reklamasi *new port* Makassar. SDKP telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 perusahaan penambangan pasir laut (PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, dan PT Boskalis Internasional), pemeriksaan terhadap pelaku usaha reklamasi (PT Pelindo IV dan PT PP Persero Tbk), serta mengambil keterangan dari Pihak Nelayan. Berdasarkan tindak lanjut tersebut, SDKP tidak menemukan pelanggaran dan telah dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi konflik;
2. Tahun 2021 di Pulau Selayar, SDKP melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang digunakan oleh PT Schultheis Dive Resort (pihak asing/luar). Berdasarkan pemeriksaan tersebut, pelaku usaha memiliki izin dan SDKP akan terus melakukan pengawasan lanjutan sehubungan dengan pelaksanaan aturan paska terbitnya UUCK, dimana pelaku usaha memerlukan perizinan pemanfaatan Pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing (PMA); serta

3. Tahun 2024 di Pulau Samalona, SDKP menyelesaikan sengketa WP3K dengan melakukan permintaan keterangan pada pihak PT Salam Pacifik Indonesia Lines (SPIL) atas kejadian kandasnya kapal kargo KM. Armada Sejati. PT SPIL menyatakan kesediaannya untuk bertanggungjawab apabila ditemukan kerusakan akibat kandasnya kapal dan SDKP akan melakukan pengenaan sanksi melalui mekanisme penyelesaian sengketa pada bulan Juni 2024.

Disamping itu, SDKP juga melakukan pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi (CITES). Adapun kasus yang telah diselesaikan oleh SDKP sejak Tahun 2022-2023 diantaranya:

Tahun	Pelaku Usaha	Lokasi	Pelanggaran	Tindak Lanjut
2022	PT Rohtadi	Bau-Bau, Sultera	Pengiriman sirip hiu dengan dokumen perizinan tidak lengkap	Sanksi administratif berupa denda
2022	Stevani	Manado, Sulut	Pemanfaatan hiu dengan dokumen perizinan tidak lengkap	Sanksi administratif berupa denda
2023	Sardjono	Bau-bau, Sultera	Pengiriman sirip hiu dengan dokumen perizinan tidak lengkap	Sanksi administratif berupa denda
2023	CV Semangat Kawan Sejati Baru	Sulsel	-	Pembinaan
2023	PT Maa Ataita Indah	Sulsel	-	Pembinaan
2023	CV Fishkal Berkah Ilahi	Sulsel	-	Pembinaan

Di lingkup perikanan, SDKP juga telah memetakan kerawanan pengawasan SDP di wilayah pangkalan PSDKP Bitung yaitu kegiatan *illegal fishing* yang sering dilakukan oleh kapal ikan asing umumnya terjadi di Laut Sulawesi, Pelanggaran tanpa dokumen perizinan umumnya dilakukan di teluk Tolo, dan pelanggaran daerah penangkapan ikan umumnya terjadi di sekitar Pulau Taliabu. PSDKP telah melakukan pendataan untuk kapal perikanan di Satwas SDKP Makassar, diantaranya:

NAMA PELABUHAN	KAB/KOTA	PROVINS I	WPP	ZONA	UPT PSDKP	<=20	20-30	JUMLAH KAPAL	Kapal pasca produksi
PP. Untia	Makassar	Sulawesi Selatan	713	Zona 6	Satwas Makassar	103	85	188	11
PP. Bonto BahariMaros	Maros	Sulawesi Selatan	713	Zona 6	Satwas Makassar	3	8	11	5
PP. Cempae	Pare-Pare	Sulawesi Selatan	713	Zona 6	Satwas Makassar	13	50	63	10
PP. Lonrae	Bone	Sulawesi Selatan	713	Zona 6	Wilker Bone	68	140	208	8
PP. Pontap	Palopo	Sulawesi Selatan	713	Zona 6	Wilker Palopo	18	2	20	-
Total						205	285	490	34

Kegiatan pengawasan kapal perikanan di laut (*while fishing*) dilakukan dengan berbagai cara yaitu menggunakan kapal pengawas kelautan dan perikanan, melalui *Regional Monitoring Center (RMC)*, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta melalui *Airborne surveillance*. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi perizinan berusaha dan kesesuaian zona penangkapan atau menganalisis dugaan pelanggaran di laut.

Tahun 2023, terdapat 2 kasus yang telah mendapatkan sanksi administratif dikarenakan tidak memenuhi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan, yaitu KM Polita Rahman Sukurillah (25 GT) dan KM Rizki Sanjaya 02 (27 GT). Sementara di Tahun 2024, SDKP masih melakukan penanganan kasus yang dilakukan oleh CV Karya Murni yang memanfaatkan jenis ikan yang dilindungi serta adanya 2 kapal perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha.

Upaya yang telah dilakukan oleh SDKP dalam meningkatkan pengawasan di wilayah Satwas SDKP Makassar antara lain:

1. Peningkatan operasi pengawasan terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan analisis data *Command Centre* dan Pusdal;
2. *Deployment* kapal pengawas dari pusat untuk menimbulkan *Deterrent Effect*;

3. Sinergi pengawasan dengan instansi terkait dengan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan SDM Pengawasan (Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K dan PPNS);
5. Peningkatan pemberian pemahaman dan kesadartahuan terhadap pelaku usaha di wilayah kerja Satwas Makassar; serta
6. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Pokmaswas.

Tanggapan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mendapatkan peringkat satu pada index *blue economy*;
2. Terkait dengan pengawasan Sumber Daya Kelautan, Pemerintah Daerah masih mengalami kendala karena keterbatasan infrastruktur khususnya di area 12 mil ke atas;
3. Terkait dengan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap, Pemerintah Daerah lebih mengedepankan dengan menggunakan pendekatan pembinaan daripada menggunakan sanksi. Hal itu dikarenakan nelayan daerah lebih banyak menggunakan alat tangkap tradisional;
4. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, menggunakan anggaran daerah;
5. Dibutuhkan sinergi dalam melakukan pengawasan sumber daya laut khususnya pada sisi regulasi; serta
6. Pembudi daya ikan di Provinsi Sulawesi Selatan mengeluhkan tidak adanya bantuan pupuk subsidi seperti di sektor pertanian, padahal petambak di Provinsi Sulawesi Selatan masih menggunakan cara tradisional sehingga dalam pengerjaannya masih membutuhkan pupuk.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk berkoordinasi antar instansi terkait dengan pupuk untuk Pembudidaya dan Petambak Garam. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung adanya perubahan UU No 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya

dan Petambak Garam yang mengatur tentang subsidi di sektor kelautan dan perikanan;

2. Komisi IV DPR RI mendorong agar terdapat peningkatan anggaran di Ditjen PSDKP guna peningkatan pengawasan dan untuk kepentingan di laut Nasional mengingat saat ini pengawasan terhadap pencurian ikan, pemboman dan pencurian ikan masih minim dilakukan;
3. Komisi IV DPR RI mengharapkan agar masa pengawasan berlayar minimal 150 hari sehingga potensi kecurangan, penyimpangan penangkapan ikan bisa diminimalisir;
4. Komisi IV DPR RI mengharapkan RUU Kelautan dapat mendorong penguatan pengawasan, anggaran dan penguatan subsidi untuk pembudidaya ikan dan lainnya;
5. Komisi IV DPR RI menyikapi bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi Negara dalam menjaga Sumber Daya Laut adalah keterbatasan infrastruktur. Kondisi saat ini, antara luas wilayah dan ketersediaan infrastruktur masih belum seimbang; serta
6. Komisi IV DPR RI menyikapi bahwa tugas Negara adalah menjaga Sumber Daya Laut dengan lebih baik.

B. PERUM BULOG KANWIL SULSEL & SULBAR

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar guna bertemu dengan berbagai stakeholder baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyuluh pertanian, penggiling padi, maupun petani yang tergabung ke dalam Gapoktan/Poktan. Komisi IV DPR RI bersama dengan Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar, dan lainnya hadir untuk menyerap aspirasi dan permasalahan terkait dengan produksi beras yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pertemuan kali ini, Perum Bulog menjelaskan terkait dengan kondisi panen dimana puncak produksi Semester I Tahun 2024 mengalami kemunduran dan diperkirakan pada bulan April-Mei 2024. Kemunduran masa panen tersebut juga diperkirakan akan mengalami penurunan produksi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya dimana perkiraan jumlah produksi pada bulan Januari-Mei 2024 diperkirakan menjadi masa panen terendah dalam 6 tahun terakhir dan diperkirakan akan mempengaruhi **kenaikan harga beras selama Semester II Tahun 2024** (diperkirakan melampaui batas psikologis pasar). **Kenaikan harga beras juga diperkirakan akan terjadi kembali karena jumlah konsumsi lebih besar dari jumlah pasokan dan ketegangan geopolitik konflik antara Iran dan Israel.**

BPS merilis KSA jika puncak panen terjadi pada bulan April 2024 dengan produksi GKG secara Nasional sebesar 9,4 juta ton. Sementara bulan Mei 2024 mengalami penurunan produksi GKG secara signifikan sehingga panen raya ini menjadi momentum bagi Perum Bulog untuk melakukan pengadaan dalam negeri guna memenuhi Cadangan Pangan Nasional.

Berdasarkan data produksi Provinsi Sulawesi Selatan, produksi tertinggi diperkirakan hanya terjadi di bulan April 2024 yaitu mencapai 956 ribu ton GKG dan sejak bulan Mei 2024 produksi padi mengalami penurunan. Bulan Mei 2024 diperkirakan mencapai 646 ribu ton GKG, dan bulan Juni 2024 diperkirakan 176 ribu ton.

Terkait dengan penyerapan tersebut, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan penyerapan dengan menggunakan HPP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu harga beras di Gudang Perum Bulog Rp9.950/kg. Mengingat kondisi pasar yang harganya saat ini telah melebihi HPP dan Pemerintah harus memberikan harga yang layak kepada petani, maka Badan Pangan Nasional mengambil kebijakan fleksibilitas harga, yaitu GKP ditetapkan dengan harga Rp6.000/kg, GKG dengan harga Rp7.400/kg, dan beras dengan harga Rp11.000/kg (di Gudang Perum Bulog).

Berdasarkan laporan Perum Bulog di lapangan, masa panen di Provinsi Sulawesi Selatan diperkirakan akan terjadi hingga pertengahan bulan Juni 2024 dan hingga saat ini sisa panen kurang lebih 30%-40% (seperti Sidrap, Pinrang, Soppeng) namun, beberapa daerah di Kabupaten Wajo terendam banjir sehingga kualitas gabah sudah mulai menurun sedangkan di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara baru akan panen mulai dari pertengahan bulan Mei 2024. Perum Bulog juga melaporkan perkembangan harga beras dan gabah di Provinsi Sulawesi Selatan dimana harga GKP sekitar Rp6.000-6.300/kg, harga beras medium di penggilingan padi sekitar Rp11.000-Rp11.300/kg, dan harga beras premium mencapai Rp12.500/kg.

Realisasi pengadaan beras secara Nasional per 5 Mei 2024 mencapai 329.961 ton setara beras. Pengadaan dilakukan untuk PSO dan skema komersial. Sementara di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Perum Bulog menargetkan 87.000 ton dan per 5 Mei 2024 sudah mencapai 73.409 ton atau sekitar 84,38%. Beberapa strategi pengadaan yang dilakukan oleh Perum Bulog antara lain:

1. Pengadaan pola PSO dan Komersial (ketika harga mengalami kenaikan maka Perum Bulog akan menyerap dengan menggunakan pola Komersial, mengikuti perkembangan harga di pasar);
2. Membuka seluruh saluran pengadaan melalui MRMP dan Mitra Kerja;
3. Pelayanan penerimaan di Gudang dan pencarian Pembayaran di Bank selama 7 hari;
4. Membentuk Tim Jemput Gabah/beras; serta
5. Kerjasama dengan dinas dan enumerator harga Bapanas.

Realisasi pengadaan per hari sekitar 15 ribu ton beras atau sekitar 30 ribu ton gabah dan diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Mei 2024. Perum Bulog saat ini telah mengoperasikan sentra penggilingan padi di 10 lokasi (Subang, Karawang, Lampung, Kendal, Sragen, Magetan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, dan Sumbawa) dan melakukan pembelian gabah langsung ke petani untuk diolah sendiri.

Ketersediaan stok secara Nasional per 2 Mei 2024 mencapai 1,6 juta ton dengan rincian:

1. CBP mencapai 1.120.593 ton
2. CBP dalam perjalanan 492.752 ton
3. Komersil 15.492 ton

Sementara komoditas lainnya yang dimiliki oleh Perum Bulog per 2 Mei 2024, antara lain: Tepung terigu sekitar 442 ton, 7.228 kilo liter, daging sapi 10 ton, gula pasir 5.143 ton, telur 7 ton, dan daging kerbau 214 ton.

Khusus untuk Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat per 2 Mei 2024 total persediaan beras mencapai 118.907 ton. Pengadaan di wilayah Sulawesi Selatan terus berlangsung dan Perum Bulog telah menyiapkan Gudang untuk menampung beras walaupun di beberapa wilayah, kapasitas Gudang hampir penuh tetapi Perum Bulog akan memindahkan beras ke wilayah yang defisit seperti Papua dan Ambon. Untuk komoditas pangan lainnya, Perum Bulog wilayah Sulselbar memiliki persediaan tepung terigu mencapai 44 ton, gula pasir 262 ton, minyak goreng 1.535 kilo liter, dan daging kerbau mencapai 1 ton.

Paparan Badan Pangan Nasional:

Badan Pangan Nasional melaporkan jika setiap minggu dilakukan monitoring inflasi pangan dan pada periode April 2024, Inflasi Nasional mengalami penurunan dari 3,05 menjadi 3,00. Sementara inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2,61 (di bawah rata-rata Nasional dan salah satu Provinsi yang dapat mengendalikan inflasi dengan baik). Penyebab inflasi pangan Nasional mencapai 3,0 dipicu oleh tingginya harga beras, bawang merah, tomat, dan daging ayam ras. Beras memiliki andil yang sangat besar dalam perubahan inflasi yaitu sekitar 0,59%.

Jika dilihat dari harga rata-rata Nasional pangan pokok dan strategis, Badan Pangan Nasional masih fokus kepada beberapa komoditas diantaranya komoditas jagung (harga jagung masih 36.19% lebih tinggi dari harga acuan), beras premium di zona II berkisar antara 6,7% lebih tinggi dari harga eceran tertinggi hingga beras premium di zona III berkisar antara 27,35% lebih tinggi dari harga eceran tertinggi.

Badan Pangan Nasional mengeluarkan SK terkait dengan harga fleksibilitas yang berlaku hingga 31 Mei 2024 dengan harapan dapat mendongkrak harga di tingkat produsen dan diharapkan Perum Bulog dapat menyerap gabah dan beras secara maksimal di bulan April 2024. Sementara bulan Mei 2024 diperkirakan produksi beras akan mengalami penurunan.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp5.750,00 atau 4,17% di bawah HPP (Rp6.000,00), sedangkan Harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani sebesar Rp7.040,00 atau 4,86% di bawah HPP (Rp7.400,00). Harga beras medium di tingkat penggilingan rata-rata Nasional sebesar Rp12.100,00 atau lebih tinggi 10% dari HPP. Di tingkat konsumen juga dilakukan relaksasi HET dengan rata-rata dinaikkan Rp1.000,00/kg.

**FLEKSIBILITAS HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH**

No	Uraian	Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg)	Fleksibilitas Harga Pembelian (Rp/Kg)
1.	Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	5.000	6.000
2.	Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG	6.300	7.400
3.	Beras di gudang Perum BULOG	9.950	11.000

Badan Pangan Nasional juga melakukan identifikasi secara Nasional terkait dengan lokasi yang wilayahnya memiliki harga GKP maupun berasnya di bawah dari harga fleksibilitas HPP sehingga bisa dilakukan penyerapan oleh Perum Bulog. Relaksasi harga juga dilakukan pada komoditas jagung, telur ayam, dan daging ayam. Untuk jagung pipil kering dengan KA 15% di tingkat Gapoktan/Poktan jagung senilai Rp4.600,00/kg, jagung pipil kering dengan KA 15% di tingkat peternak ayam (petelur dan pedaging) senilai Rp5.500,00/kg, telur ayam ras di tingkat peternak ayam Rp24.000,00-Rp26.000,00/kg, *Live bird*/ayam hidup di tingkat peternak ayam senilai Rp24.000,00-Rp27.000,00/kg. Sementara telur ayam ras di tingkat

masyarakat Rp28.000,00-Rp30.000,00/kg dan daging ayam ras di tingkat masyarakat Rp38.000-Rp41.000,00/kg. SPHP jagung, Stok jagung di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5.529 ton sementara Nasional sisa stok mencapai 93.797 ton.

Realisasi SPHP di tingkat konsumen per 30 April 2024 secara Nasional serapannya masih 55,44%. Bantuan Pangan periode Januari-Maret 2024 sudah dilaksanakan hampir 100% telah dikerjakan. Sementara Tahap II (April-Juni 2024) realisasinya mencapai 11%.

Komoditas bawang merah juga menjadi isu Nasional dan menjadi perhatian Badan Pangan Nasional, dimana 6 Provinsi dengan jumlah produksi tertinggi, menyumbang 90 persen produksi nasional digunakan untuk disalurkan ke wilayah ke daerah yang defisit. Contohnya:

Realisasi FDP 2024		
Lokasi Asal	Lokasi Tujuan	Volume (kg)
Gapoktan Jawa Barat	Kios Pangan Jawa Barat	12.500
Brebes Jawa Tengah	Kalimantan Timur	15.000
Solok Sumatera Barat	PIKJ	18.487
Jombang	Kab merauke	15.000
Sulawesi Utara	Kepulauan Riau	2.158
Kab. Bener Meriah Aceh	Kab. Aceh Besar	17.836
DI Yogyakarta	Sumatera Barat	1.560

Badan Pangan Nasional Sumber: Badan Pangan Nasional, update 3 Mei 2024

Terkait dengan penugasan CPP Tahun 2024 kepada Perum Bulog dan BUMN Pangan, beras dan jagung dapat bisa memenuhi kebutuhan CPP sementara komoditas lainnya masih belum maksimal dilakukan.

KOMODITAS	JUMLAH MINIMAL YANG DIKELOLA (TON)	JUMLAH MINIMAL STOK AKHIR Tahun (TON)
Beras	2.400.000	1.200.000
Jagung	250.000	60.000
Kedelai	100.000	20.000
Daging Sapi	20.000	2.500
Daging Kerbau	100.000	5.000
Daging Ayam	12.000	600
Telur Ayam	7.000	-
Gula Konsumsi	250.000	25.000
Minyak Goreng	100.000	5.000
Bawang Merah	100	-
Bawang Putih	1.000	100
Cabai	100	-
Ikan Kembung	250	50

Menurut Badan Pangan Nasional, yang harus diperhatikan secara serius terkait dengan produksi pertanian adalah:

1. Laju alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar dan massive karena diikuti dengan tingginya laju alih profesi. Laju alih fungsi lahan Pulau Jawa 1979-1999 = 1.002.055 ha atau 50.102 ha/tahun; sampai tahun 2023 bertambah 24 tahun x 50.102 ha = 1.202.448 ha. Total alih fungsi lahan dari 1979-2023 = 2.204.503 ha. Produktivitas pangan sudah *leveling off*, terjadi penurunan kualitas (degradasi) lahan, diperparah adanya perubahan iklim yang menyebabkan resiko gagal panen meningkat. Hanya 10% (552.543,7 ha) dari cakupan wilayah irigasi seluas 5.525.437 ha yang tersedia air sepanjang tahun. **Berdasarkan data yang diterima Bapanas pada Tahun 2000, jumlah petani mencapai 33 juta, sementara dalam data Susenas menyebutkan saat ini jumlah petani mencapai 28 juta petani/ setiap tahun mengalami pengurangan 1 juta petani.** Menteri Pertanian juga menyatakan bahwa Negara dalam kondisi darurat pangan sementara Bapanas menyebutkan bahwa Negara dalam kondisi darurat mandiri pangan;
2. Luas tanam dan produksi padi menurun tajam. Luas tanam Oktober 2023 s.d. Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar. Produksi beras sejak tahun 2019 - 2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton. Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri (Menteri Pertanian);
3. Pangan tergantung impor. Impor pangan tahun 2013 sebesar USD 10,0 miliar, meningkat USD 8,6 Miliar (129 triliun) pada tahun 2022 menjadi USD 18,6 miliar setara 279 triliun (Dwi Andreas, IPB); 9 dari 13 atau 70% pangan strategis dipenuhi dari impor dengan kecenderungan semakin besar (yang tidak impor hanya minyak goreng, cabai, dan bawang merah). Kualitas dan harga pangan impor cenderung lebih baik

dan murah, menekan harga di tingkat petani/peternak, dan semangat kemandirian pangan semakin jauh dari harapan;

4. Jumlah konsumsi pangan meningkat. Laju 0,76 % per tahun (2.133.548 jiwa) menjadi 280,73 juta jiwa tahun 2023; serta
5. Diversifikasi pangan berjalan lambat. Dominasi beras dan terigu, preferensi konsumen terhadap pangan lokal masih rendah.

Paparan Pemerintah Daerah Kota Makassar

1. Pemerintah kota Makassar bekerjasama dengan Perum Bulog untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah sebanyak 8 kali dalam 1 bulan yang disebar di 15 kecamatan; serta
2. Kota Makassar memiliki cadangan pangan sendiri sebanyak 73 ton dan aka nada penambahan sebesar 20 ton. Kota Makassar merupakan kota yang hampir memenuhi syarat dan peraturan Badan Pangan Nasional No 15 Tahun 2023.

Paparan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan

1. Dalam 2 tahun terakhir jumlah petani berkurang sebesar 1,98%, alih fungsi lahan dalam 3 tahun terakhir mencapai 6%. Perlu ada langkah nyata dan kongkrit karena *punishment* yang selama ini dilakukan tetap tidak menurunkan angka alih fungsi lahan. Perlu ada *reward/* insentif bagi masyarakat yang mempertahankan lahan pertaniannya khususnya yang berdekatan dengan ibukota;
2. Terkait dengan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah lahan yang terkena banjir sebesar 7527 Ha sedangkan luas puso 450 Ha dan susut sekitar 484 Ha (padi) dan 3000 Ha (jagung). Oleh karena itu dibutuhkan langkah dan target dalam mengatasi permasalahan ini;
3. Ketika terjadi kekeringan dan banjir, Pemerintah Daerah selalu mengusulkan untuk dibantu benih dari Kementerian Pertanian, namun hingga saat ini bantuan tersebut tidak ada. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan Nasional untuk mempersiapkan cadangan benih Nasional karena siklus musim Nasional sangat jelas; serta

4. Terkait dengan tambahan pupuk subsidi. Pemerintah Daerah membutuhkan proses percepatan pada administrasi karena sudah ada kuota dari Kementerian Pertanian.

Tanggapan dan Aspirasi Petani, Masyarakat, dan Dinas Lainnya:

1. Petani menyoroti adanya tambahan kuota pupuk dan hingga hari ini belum ada realisasi tambahan yang diterima pupuk. Alokasi pupuk subsidi Tahun 2024 sangat tinggi pengurangannya (hampir 50%) contohnya Urea yang seharusnya menggunakan 250 kg dan saat ini hanya mendapatkan 130 kg sementara pupuk Phonska yang biasanya mendapatkan 300 kg, saat ini hanya mendapatkan 80 kg. Kebijakan pengurangan ini tidak sebanding dengan harapan Pemerintah yang menginginkan produksi pertanian agar dimaksimalkan;
2. Pada saat panen, harga gabah di beberapa lokasi harganya di bawah dari harga Perum Bulog. Salah satu petani juga pernah menjual harga GKP sekitar Rp5.000/kg;
3. Diharapkan bantuan alsintan tepat sasaran karena umumnya pemberian bantuan alsintan diberikan kepada masyarakat yang cukup sejahtera. Umumnya petani yang ingin menggunakan alsintan diharuskan membayar fee sehingga perlu disoroti dan menjadi perhatian dari Komisi IV DPR RI dan Pemerintah;
4. Penyuluh hampir setiap hari melakukan virtual zoom yang tidak relevan dan seharusnya penyuluh melakukan kegiatan lapangan untuk merubah perilaku petani. Penyuluh juga mengharapkan tambahan dana untuk kegiatan verval/input data RDKK karena tidak ada honor untuk tim verval;
5. Meminta dukungan kendaraan operasional (yang baru) untuk penyuluh di lapangan;
6. Terkait pengimputan RDKK, tim penyuluh ada pengimputan dan verifikasi secara berjenjang dan sejak tahun lalu sudah tidak ada honor. Disamping itu, input harus dilakukan malam hari dikarenakan sistemnya sering bermasalah. Input sangat terbatas sehingga meminta kelonggaran untuk waktu input data; serta

7. Biaya operasional untuk penyuluh setiap bulan sekitar Rp400 ribu. Beberapa penyuluh mengapresiasi adanya *zoom meeting* yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian karena penyuluh juga mendapatkan tambahan BOT dari kegiatan tersebut.

Tanggapan Kementerian Pertanian:

1. Terkait dengan pupuk subsidi, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat edaran terkait tambahan alokasi pupuk subsidi. Terkait dengan alokasi pupuk subsidi tidak mengalami penambahan, hanya penambahan anggaran karena harga pupuk mengalami kenaikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, alokasi pupuk subsidi sebelum adanya penambahan (4,7 juta ton) masih tersedia/belum habis. Kementerian Pertanian meminta dinas dan penyuluh pertanian agar RDKK segera diusulkan kembali;
2. Terkait dengan bantuan alsintan, diharapkan petani untuk melaporkan dalam bentuk laporan tertulis terkait dengan *fee* penggunaan alsintan agar segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian;
3. Terkait dengan virtual zoom TOT (*Training Of Trainer*) dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Kementerian Pertanian mengakui jika ada pelatihan yang dilaksanakan hampir setiap hari dan tidak diwajibkan untuk diikuti (Tanaman Pangan, BSIP, BPSDMP);
4. BOP dan pulsa, Kementerian Pertanian telah menganggarkan untuk penyuluh setiap bulannya, sedangkan untuk honor pengimput data, Kementerian Pertanian telah menganggarkan namun terkena refocusing. Sedangkan terkait dengan kendaraan operasional seharusnya disediakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Alih fungsi lahan sangat menkhawatirkan dan diharapkan menjadi atensi dari Pemerintah Daerah. Tidak ada insentif untuk mengamankan alih fungsi lahan secara khusus, namun seluruh program Kementerian Pertanian termasuk ke dalam insentif dalam rangka mengamankan alih fungsi lahan;
6. Jumlah petani yang turun, selain dikarenakan pergeseran alih profesi juga dikarenakan adanya pemanfaatan alsintan;

7. Terkait dengan banjir yang terjadi pada lahan pertanian, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 700 benih. Sementara terkait dengan cadangan benih, Kementerian Pertanian membutuhkan referensi yang harus didukung oleh Komisi IV DPR RI;
8. Terdapat bantuan optimasi lahan untuk lahan pertanian yang terkena banjir atau puso sedangkan persediaan benih secara Nasional untuk tanam padi sudah ada;
9. TNI/Polri dihadirkan pada program pompanisasi digunakan untuk membantu petani dan anggaran TNI/Polri diambil dari anggaran Babinsa dari Ditjen PSP.

Tanggapan dari Pupuk Indonesia:

1. Alokasi tambahan dari Kementerian Pertanian sudah di *follow up* oleh PT Pupuk Indonesia;
2. Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan kenaikan kuota pupuk subsidi dari 686 ribu ton ke 819 ribu ton. Saat ini terdapat 94 ribu ton yang siap untuk disalurkan di Provinsi Sulawesi Selatan sementara secara Nasional terdapat 2 juta ton;
3. Penyaluran mempengaruhi kecepatan dalam menyediakan 9,5 juta ton karena kapasitas Gudang terbatas; serta
4. PT Pupuk Indonesia berharap agar alokasi ke Kabupaten segera direalisasikan sehingga PT Pupuk Indonesia bisa menyalurkan ke kios-kios yang bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia.

Tanggapan dari Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian serius terkait dengan kondisi pupuk karena pupuk merupakan komponen penting dalam produksi;
2. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah/beras petani;
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk tegas dalam pemberian sanksi terhadap alihfungsi lahan dan dibutuhkan surat edaran terkait dengan alihfungsi lahan tersebut. Komisi IV DPR RI menyikapi bahwa

alihfungsi lahan banyak terjadi dikarenakan kesejahteraan petani tidak terjamin;

4. Komisi IV DPR RI menyoroti jumlah petani di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 10 terakhir semakin menurun. Oleh karena itu, Pemerintah harus membuat program yang dapat memastikan proses peralihan fungsi profesi petani agar tidak hilang, salah satunya dengan memberikan jaminan produksi yang menguntungkan dan kesehatan yang terjamin;
5. Kekurangan pupuk diharapkan dapat dipenuhi oleh Pemerintah;
6. Komisi IV DPR RI menyoroti adanya refocusing yang digunakan untuk pengadaan pompa. Komisi IV DPR RI menyikapi Pemerintah harus bisa menggunakan anggaran dengan baik dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani;
7. Komisi IV DPR RI menyoroti kebijakan pompanisasi yang tidak diimbangi dengan pengadaan benih; serta
8. Komisi IV DPR RI menerima aspirasi terkait dengan dana input data (e-Verval) yang dilakukan oleh penyuluh.

C. AGROFARM STORE

Populasi sampah yang besar menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan solusi dalam pengelolaannya, agar sampah yang ada di masyarakat dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat. Menurut Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) terdapat timbulan sampah di Indonesia sebanyak 18,30 juta ton dalam skala nasional ditahun 2022 dan didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 41,4% yang berakhir sia-sia di Pembuangan Akhir.

Berdasarkan Neraca pengelolaan sampah Tahun 2023 periode 2, timbulan sampah yang dihasilkan Kota Makassar setiap tahunnya mencapai 376.707,41 ton. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam menurunkan timbulan sampah yaitu dengan 2 cara. Cara pertama adalah dengan melakukan pengolahan dan pemrosesan akhir sebanyak 313.855,17 ton setiap tahunnya (Pengolahan sebesar 29,07 ton/tahun dan pemrosesan akhir sebesar 313.826,1 ton/tahun) dan cara kedua dengan

melakukan pengurangan sampah sebesar 15.645,29 ton setiap tahunnya (pembatasan sebesar 30,71 ton/ tahun, pemanfaatan kembali sebesar 247,68 ton/tahun, dan pendauran ulang sebesar 15.366,9 ton/tahun).

Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi timbunan sampah di TPA adalah dengan bekerjasama dengan Urban Agrofarm. Urban Agrofarm sendiri merupakan sekumpulan anak muda yang mengintegrasikan *skill interpreneur* dan *skill* pertanian dengan visi dan komitmen yang kuat dalam pelestarian lingkungan. Usaha yang dibangun bukan hanya menitikberatkan pada tujuan keuntungan semata (*profit oriented*) tapi juga pada dampak lingkungannya (*ecology oriented*) agar menghasilkan *social impact* yang besar kedepannya.

Urban Agrofarm berkomitmen melakukan setiap aktivitas dan lini produksi dengan prinsip *zero waste* yaitu tanpa menghasilkan limbah. Pengelolaan limbah tanpa bau, tanpa residu, dan tanpa pencemaran air serta udara dan sangat layak untuk ditempatkan ditengah perkotaan.

Urban Agrofarm melalui *waste management* dalam projek *waste solution* sekaligus pertanian terpadu (*urban integrated farm*), bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah organik dengan teknologi biokonversi maggot BSF (*Black Soldier Fly*). Limbah organik tersebut akan diproses menjadi pakan berprotein tinggi dan pupuk organik.

Sebagai langkah hilirisasi, Urban Agrofarm mengintegrasikan budidaya maggot dengan ternak ayam kampung dan budidaya ikan lele. Urban Agrofarm mampu memproduksi maggot setiap harinya sebanyak 200 kg. Pakan ternak berkualitas dan berprotein tinggi yang dihasilkan, dimanfaatkan untuk ternak sendiri dan dijual ke peternak lokal yang mengalami kendala harga pakan yang semakin hari semakin mahal. Dengan bahan baku yang sangat murah, maggot berpotensi menjadi pakan alternatif pengganti konsentrat atau tepung ikan yang semakin langka. Saat ini Pemerintah kota Makassar telah melakukan fasilitasi kerjasama antara Urban Agrofarm dengan peternak ayam/unggas agar dapat memasok pakan berprotein tinggi. Selain itu digunakan untuk pakan ternak, media

bekas maggot (kasgot) dapat digunakan menjadi pupuk organik dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KLHK, Urban Agrofarm mampu menangani sampah organik sebanyak 2 ton per hari yang diambil dari beberapa pasar tradisional. Selain bekerjasama dengan Urban Agrofarm, Pemerintah Kota Makassar saat ini fokus dalam mengelola sampah menjadi energi listrik (PSEL). Adapun tindak lanjut pembangunan PSEL kota Makassar:

1. Progress. Pemerintah Kota Makassar sedang dalam proses pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pemerintah Kota Makassar juga sudah mendapatkan mitra, sudah selesai masa sanggah, dan selanjutnya akan dilakukan penetapan pengesahan pemenang;
2. Kerjasama. Membutuhkan pendampingan dari KLHK terkait dengan mekanisme mendapatkan bantuan BLPS dan diharapkan pada Tahun 2024 mendapatkan persetujuan bantuan BLPS agar Tahun 2026 mendapatkan COD. Pada tahun awal operasional PSEL, Pemerintah Kota Makassar akan fokus pada pemeliharaan dan pengadaan armada pengangkut sampah ke lokasi PSEL, sehingga Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan lebih besar dari pusat;
3. Biaya. Pemenang tender memberikan penawaran BLPS sebesar Rp 380.000 per ton sampah untuk 5 tahun pertama sedangkan Penawaran tertinggi di angka Rp 420.000 per ton. Semakin banyak sampah yang masuk (>1300 tpd) nilai BLPS dapat diturunkan.

Aspirasi dari Urban Agrofarm:

1. Urban Agrofarm mampu memproduksi Maggot dengan cukup banyak namun terkendala pemasaran dan belum ada yang mampu menampung hasil produksinya;
2. Sejauh ini perusahaan belum bisa mendapatkan keuntungan (bahkan minus);
3. Urban Agrofarm masih kesulitan untuk mendapatkan sampah organik dan membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah;

4. Membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan SDM (keterbatasan SDM untuk operasional);
5. Meminta dukungan terkait dengan biaya operasional industry maggot;
6. Sebanyak 10.000 maggot dapat menghabiskan 1 kg sampah organik dalam waktu 24 jam. Sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Meskipun dari limbah sampah organik, namun pupuk yang dihasilkan tidak berbau;

Tanggapan Pemerintah Kota Makassar:

1. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen dalam mendukung industry maggot dengan menjanjikan bantuan berupa 5 unit motor Viar;
2. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menyediakan tenaga khusus dan gaji akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Kota Makassar telah mendorong Bank Sampah untuk bekerjasama dengan Urban Agrofarm; serta
4. KLHK akan membantu Urban Agrofarm untuk berkoordinasi dengan komunitas maggot seluruh Indonesia terkait dengan hilirisasi atau penjualan hasil produksi.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI menyikapi budidaya maggot berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan peternak di Kota Makassar baik dari segi produktivitas maupun kualitas produksi;
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya memberikan dukungan dalam pengembangan industri budidaya maggot;
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membantu Urban Agrofarm karena kegiatan yang dilakukan oleh Urban Agrofarm membantu dalam penanganan masalah sampah dan dapat menghasilkan pupuk organik;
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung kebutuhan sampah organik Urban Agrofarm dengan mengirimkan sampah ke tempat pengolahan Urban Agrofarm;

5. Pemerintah harus membuat regulasi untuk memfasilitasi pembudidaya maggot agar semakin berkembang;
6. Komisi IV DPR RI berharap Pemerintah dapat mendukung perkembangan asosiasi pembudidaya maggot dengan menghubungkan industri maggot dengan pelaku pengusaha pakan lainnya; serta
7. Dibutuhkan peran aktif Pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri maggot.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk berkoordinasi antar instansi terkait dengan pupuk untuk Pembudidaya dan Petambak Garam. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung adanya perubahan UU No 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam yang mengatur tentang subsidi di sektor kelautan dan perikanan;
2. Komisi IV DPR RI mendorong agar terdapat peningkatan anggaran di Ditjen PSDKP guna peningkatan pengawasan dan untuk kepentingan di laut Nasional mengingat saat ini pengawasan terhadap pencurian ikan, pemboman dan pencurian ikan masih minim dilakukan;
3. Komisi IV DPR RI mengharapkan agar masa pengawasan berlayar minimal 150 hari sehingga potensi kecurangan, penyimpangan penangkapan ikan bisa diminimalisir;
4. Komisi IV DPR RI menyikapi bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi Negara dalam menjaga Sumber Daya Laut adalah keterbatasan infrastruktur. Kondisi saat ini, antara luas wilayah dan ketersediaan infrastruktur masih belum seimbang;
5. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah/beras petani;
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk tegas dalam pemberian sanksi terhadap alihfungsi lahan dan dibutuhkan surat edaran terkait dengan alihfungsi lahan tersebut. Komisi IV DPR RI menyikapi bahwa

alihfungsi lahan banyak terjadi dikarenakan kesejahteraan petani tidak terjamin;

7. Komisi IV DPR RI menyoroti jumlah petani di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 10 terakhir semakin menurun. Oleh karena itu, Pemerintah harus membuat program yang dapat memastikan proses peralihan fungsi profesi petani agar tidak hilang, salah satunya dengan memberikan jaminan produksi yang menguntungkan dan kesehatan yang terjamin;
8. Kekurangan pupuk diharapkan dapat dipenuhi oleh Pemerintah;
9. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya memberikan dukungan dalam pengembangan industri budidaya maggot;
10. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membantu Urban Agrofarm karena kegiatan yang dilakukan oleh Urban Agrofarm membantu dalam penanganan masalah sampah dan dapat menghasilkan pupuk organik;
11. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Kota Makasar untuk mendukung kebutuhan sampah organik Urban Agrofarm dengan mengirimkan sampah ke tempat pengolahan Urban Agrofarm;
12. Dibutuhkan peran aktif Pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri maggot.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dan informasi yang diperoleh berbagai pihak dan akan kami bawa dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Jakarta, Mei 2024

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M.

MITRA PENDAMPING

Kementan:

1. Prof. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr - Kepala BPPSDMP
2. Muhammad Sidiq, S.TP., MM - Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, BPPSDMP
3. Dr. Detia Tri Yunandar, SP, M.Si - Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa, BPPSDMP4. Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si - Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
4. Dr. Ir. Enie Tauruslina A, MP. - Direktur Aneka Pangan dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (TP)
5. Ir. Indah Megahwati, MP - Direktur Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
6. Dr. Drh. Nuryani Zainuddin, M.Si - Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)

KKP:

1. Dr. Agus Suherman, S.Pi., M. Si. (Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut)
2. Ir. Suharta, M.Si (Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)

KLHK:

1. Dr. Ir. Novrizal Tahar. IPU - Direktur Penanganan Sampah , Ditjen PSLB3
2. Ir. Jusman - Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku dan Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
3. Kepala Balai TN BABUL (Tutut Heri Wibowo, S.Hut., M.Eng))
4. Kepala Balai Gakkum (Aswin Bangun, S.Hut, M.Si.)
5. Kepala BPSILHK Makassar (Mochlis, S.Hut.T.,M.P.)
6. Kepala BPPI Wilayah Sulawesi (Beni A. Noor, S.Hut., M.Si)
7. Kepala BPSKL Wilayah Sulawesi (Mochsin, S.Hut., M.Si)
8. Kepala BPKHTL VII Makassar (Ir. Yuna Pabutungan, M.Si)

9. Kepala BPTH Wilayah II (Ir. Evi Budiaryanti, M.Si)
10. Plh. Kepala BPLHK Makassar (Dr. Arif Muhammadiyah)
11. Kepala BPDASRHJS (Abd. Aziz, S.Hut., M.Sc)

BAPANAS:

1. Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP (Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan)
2. Dr. Anas (Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan)

Perum BULOG:

1. Mokhamad Suyamto - Direktur supply chain dan pelayanan publik
2. Akhmad Kholisun - Pimpinan Wilayah BULOG Kanwil Sulselbar

PT Pupuk Indonesia:

1. Bpk. Wono Budi Tjahyono - Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT RNI/ID FOOD:

1. Yossi Istanto (Direktur Human Capital dan Legal PT RNI(Persero))

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



LIPUTAN MEDIA

Makassar – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam upaya pencegahan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Peralannya, selama ini masa berlayar kapal pengawas dalam setahun hanya 45 hari.

“Kami di Komisi IV DPR sebetulnya sudah mendorong agar ada peningkatan anggaran ke Ditjen PSDKP sebagai pengawas dan pembela kepentingan di laut kita. Kalau kita lihat, anggarannya kecil sekali, tidak sampai Rp1 triliun. Apalagi masa berlayar kapal hanya 45 hari dalam setahun, tidak sampai 12 persen dari 365 hari. Bagaimana kita bisa mengawasi pencurian ikan, pemboman dan pencurian ikan kalau kondisinya seperti ini. Saya kira pengawasan yang sekarang ini sangat minim sekali,” kata Andi saat mengikuti Kunler Reses Komisi IV DPR mengunjungi Satker PSDP di Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (7/5/2024).

Legislator Dapil Sulsel II ini berharap, kedepannya masa hari pengawasan berlayar minimal 150 hari. Sehingga potensi kecurangan, penyimpangan penangkapan ikan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya, sebenarnya ada potensi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di Sulawesi sendiri ada 400 kapal yang tiap hari menangkap ikan tuna 5-10 ton per kapal.

“Bisa dibayangkan potensinya gitu kan dan kita melihat bahwa dari sekian banyak hasil tangkapan ini belum maksimal untuk PNBP, karena tadi apa namanya, gross tone kapalnya ini masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Andi.

Kedepan, menurut Politisi F-PKS ini, dengan adanya RUU Kelautan, Komisi IV akan mendorong penguatan pengawasan, anggaran dan penguatan subsidi untuk pembudidaya ikan dan lain-lain. “Karena kita berharap negara juga hadir pada saat dibutuhkan subsidi untuk nelayan. Misalnya sekarang nelayan disubsidi solar, tapi banyak juga dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar, bahkan banyak lari ke industri. Ini kan jadi masalah. Saya kira perlu regulasi yang tegas dan pengawasan yang kuat, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada anggaran tersebut bisa terwujud itu,” ucap Andi.

Sumber://fakta.news/berita/komisi-iv-dorong-peningkatan-anggaran-pengawasan-laut-di-makassar.

Sumber lainnya:

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49399/t/Komisi%20IV%20Dorong%20Peningkatan%20Anggaran%20Pengawasan%20Laut%20di%20Makassar>
2. <https://dpr.nusantaratv.com/senayan/mengkhawatirkan-jumlah-petani-di-sulsel-tiap-tahun-makin-berkurang>
3. <https://www.pantau.com/ekonomi/205931/penurunan-jumlah-petani-di-sulawesi-selatan-jadi-perhatian-serius-dpr>
4. <https://sindomakassar.com/read/sulsel/8460/petani-sulsel-terus-menyusut-52-ribu-upt-berkurang-dalam-10-tahun-1715641557>

5. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49414/t/Mengkhawatirkan,%20Jumlah%20Petani%20di%20Sulsel%20Tiap%20Tahun%20Makin%20Berkurang>
6. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/07/rumah-maggot-haji-sulaiman-di-makassar-bakal-dapat-oven-dan-pengering-dari-komisi-iv-dpr-ri>
7. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49413/t/Maggot%20Bisa%20Urai%20Sampah%20Organik%20Per%20Ton%20Sehari,%20Pemerintah%20Harus%20Fasilitasi%20Pembudidayanya>